

Bayu Tanoyo :

PARADIGM SHIFT:

KONSEP PENGEMBANGAN KONSERVASI ARSIP DALAM MENDUKUNG IBU KOTA NEGARA BARU

Perkembangan era informasi dewasa ini begitu pesat. Laju yang begitu cepat seiring tuntunan zaman dan keterbukaan informasi mau tidak mau mewajibkan kita untuk terus berlomba di dalamnya. Ditambah dengan adanya persaingan global dan antar negara semakin mewajibkan kita untuk siap turut serta dalam tantangan tersebut terutama memasuki era disrupsi informasi. Era disrupsi yang dimaksud adalah dalam konteks memanfaatkan sumber daya untuk mendukung aktivitas ke dalam daring (*online*).

Dewasa ini di Indonesia tengah beredar luas informasi bahwa akan adanya pembentukan Ibu kota Negara baru (selanjutnya disingkat IKN) sebagai jawaban atas permasalahan yang tengah larut dewasa ini, terutama pada masalah lingkungan dan over-populasi yang ada di Jakarta. Presiden Joko Widodo langsung memberikan pidato kenegaraannya dan memproklamkan ibu kota baru yang berada di Kalimantan tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 [Bappenas RI]. Penentuan wilayah tersebut tentu didasarkan dengan pertimbangan seperti kecilnya risiko bencana alam di wilayah tersebut, dekat dengan kota yang sudah berkembang (Balikpapan dan

Samarinda), infrastruktur yang relatif lengkap dan adanya 180 hektar tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Beberapa negara di dunia telah mengaplikasikan mengenai konsep IKN.

Diharapkan dengan adanya IKN baru ini mampu menjadi *problem solving* yang mendera sejumlah Negara. Selain itu perlu adanya kesinambungan dan berkelanjutan guna meningkatkan SDM, kinerja dan taraf hidup masyarakat.

Tak pelak informasi tersebut memaksa instansi dan kementerian/ lembaga untuk ikut menyesuaikan atas kinerja yang ada di pemerintahan. Pemerintah pun akhirnya menelurkan suatu gagasan dan konsep IKN baru dengan nama “Nagara Rimba Nusa” Suatu konsep yang menggabungkan harmonisasi alam dengan modernisasi.

Salah satu kementerian yang terimbas akan adanya IKN baru adalah

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lembaga ini berkecimpung pada permasalahan arsip dan dokumen negara. Pasalnya lembaga ini berada di wilayah pemerintahan pusat dan seiring berjalannya waktu maka lembaga ini perlu melakukan persiapan dalam mendukung IKN baru tersebut. Sejujurnya momentum IKN baru ini amat sangat positif terutama dalam cara berpikir dan memandang arsip (*paradigm shift*). Konteks arsip yang selama ini berkuat pada permasalahan fisik mampu digeser menjadi perspektif yang lebih berkembang. Tentunya cara berpikir ini wajib didukung oleh semua pihak terutama para *stakeholder* yang berwenang demi hasil yang optimal. Tidak hanya itu, program ini dititikberatkan pada komitmen yang kuat dan stabilitas program percepatan digitalisasi guna mendukung program tersebut. Pada pembahasan kali ini adalah perspektif konservasi, dimana konservasi

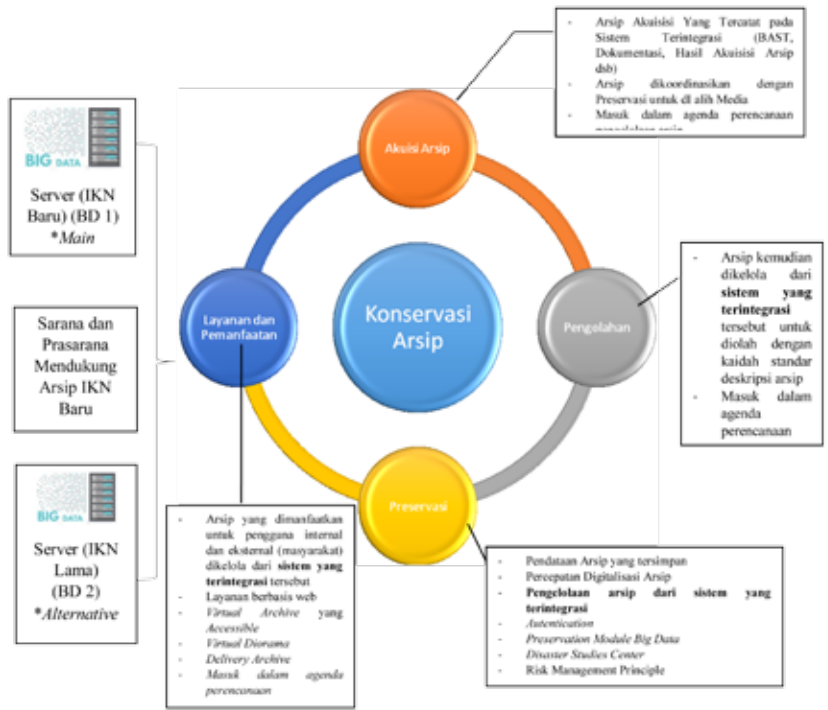
No.	Negara	Ibukota Negara Lama	Ibukota Negara Baru
1.	Amerika Serikat	Philadelphia, Baltimore, Lancaster, Princeton, Annapolis, Trenton, York dan New York.	Washington DC
2.	Brazil	Rio de Janeiro	Brasilia
3.	India	Kolkata	New Delhi
4.	Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya
5.	Australia	Melbourne	Canberra

(dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020)

Beberapa negara di dunia yang telah mengaplikasikan mengenai konsep IKN



(Gambar Konsep Ibu Kota Negara Baru-Nagara Rimba Nusantara, sumber : Kemen-PUPR)



(Gambar Konsep Desain Konservasi di era disrupsi informasi mendukung IKN Baru)

yang mendukung pemerintah 10-20 tahun yang akan datang. Konservasi arsip sebagai salah satu jantung dari keberadaan lembaga kearsipan perlu berbenah diri agar mampu menjawab tantangan di masa depan. Perspektif yang memandang bukan hanya sebagai tumpukan berkas dan sebagainya melainkan perspektif

arsip sebagai sumber informasi yang bernilai. Penekanannya lebih kepada materi dan konten dari arsip yang mampu dipergunakan sejumlah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi tentu menjadi jawaban atas permasalahan ini di era disrupsi dewasa ini. Mekanisme yang

mudah dengan tetap menjaga esensial informasi arsip menjadi perspektif kita sebagai lembaga pembina kearsipan. Terlebih bilamana *think of future* berbasis *Artificial Intelligence* dan *Accessibility*, baik itu sepenuhnya dengan mekanisme otomasi dan robotik maupun bersifat *hybrid*. Melihat pada teori kearsipan terutama *Record Continuum Management* dan *Lifecycle of Archive* maka mampu kita implementasikan sebagai bentuk dukungan pada IKN baru.

Pemanfaatan teknologi ini tentu akan mempermudah dan membantu pengguna sebagai tujuan kita sehingga pemaksimalan terhadap isi informasi dalam arsip dapat dilakukan, baik itu untuk pengawasan, pendidikan hingga pada penelitian yang membutuhkan informasi yang valid dengan lembaga yang kompeten. Lingkup konservasi arsip bila mengacu pada SOTK ANRI (Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020) maka terdapat beberapa unit atau bagian seperti akuisisi, pengolahan, preservasi dan pemanfaatan. Kesinambungan kinerja tentu dibutuhkan demi terlaksananya informasi arsip yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan keberadaan lembaga ini mampu menciptakan atmosfer baru dalam pengelolaan arsip yang lebih efektif dan efisien.

Pada gambar konsep desain konservasi arsip di era disrupsi informasi mendukung IKN Baru dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama, aplikasi yang mapan dan *sustainable* dengan dukungan sarana dan prasarana dalam hal ini sebagai modal utamanya jaringan dan *big server* yang terbagi atas 2 bagian besar primer (IKN baru) dan sekunder (IKN lama).

Kedua, pada akuisisi kemudian mencatat pada aplikasi terintegrasi dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan beserta arsip yang diterima. Koordinasi juga dilakukan pada unit preservasi untuk mempersiapkan



(1)



(2)

Gambar Model Records Continuum Management (1) dan Lifecycle of Archive (2)

perencanaan dan digitalisasi.

Ketiga, pada pengolahan mengatur catatan dari akuisisi dan mengolah informasinya yang diperoleh dari aplikasi yang terintegrasi didasarkan pada kaidah standar deskripsi arsip.

Keempat, preservasi menjadi ujung tombak dalam menginisiasi dan implementasi digitalisasi Arsip dari aplikasi terintegrasi dengan tidak mengesampingkan arsip yang berada di Depot ANRI. Tentu hal ini perlu didukung dengan penyimpanan digital, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) digital, prosedur autentifikasi dan penerapan manajemen risiko di tiap level.

Kelima, pemanfaatan dan layanan mengadopsi pekerjaan dari keseluruhan pekerjaan akuisisi, pengolahan, dan menyesuaikan dengan unit Preservasi. Barang tentu juga pentingnya mengontrol penggunaan dan pemanfaatan oleh masyarakat. Bila dimungkinkan setiap pemakai teregistrasi sehingga mempersempit *loss control* dari kondisi yang tidak terkontrol.

Mengutip dari konsep organisasi yang efektif dengan berbasis kinerja dari Mark G. Popovich (dalam LAN, 2004 : 16) maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Pertama, *Consistent and Sustained Leadership*. Kedua, *Willingness to Develop Performance Measures*. Ketiga, *Willingness to Change Whole Organizations*. Keempat, *Willingness to Allocate Resources to Continues Learning*.

Perluasan dari konsep tersebut maka ada beberapa unsur dan elemen yang mampu dijabarkan sebagai gambaran dari konservasi arsip guna menuju konservasi yang lebih berdaya guna terutama IKN Baru. Adanya konsistensi dan berkelanjutan dari kepemimpinan organisasi menjadi elemen pertama dalam meningkatkan kualitas organisasi. Mengacu dari pendapat Popovich dalam hal konsistensi dan paradigma berkelanjutan dari pimpinan yang lebih fleksibel dan selalu menuju arah perkembangan yang positif, berdaya guna, efektif dan efisien, Hal tersebut senada pendapat dari Toorney (2016) "*digital leadership are concept of leadership to the paradigm shift of the digital era and defines digital leadership as follows. It is the capability of (business) leaders to identify and realize opportunity for (business) growth and value through effective, efficient and acceptable use of Digital Technologies (IT).*" Point penting yang disebutkan Toomey adalah kemampuan pemimpin untuk dapat

mengidentifikasi dan merealisasikan peluang untuk mengembangkan bisnis melalui penggunaan teknologi digital yang efektif dan efisien. Dapat pula diinterpretasikan pada penekanan pemimpin yang memiliki semangat, paradigma dan jiwa kepemimpinan digital (*digital leadership*).

Elemen berikutnya adalah ketersediaan adanya pengembangan kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja menjadi poin penting selanjutnya untuk dapat mengukur standar dan ukuran baku suatu pekerjaan. Penguatan sinergitas ukuran kinerja yang baku dan standardisasi, sehingga roda organisasi berjalan baik terutama dengan tersedianya aplikasi yang terintegrasi disertai dengan penyederhanaan alur kerja berstandar. Pada era teknologi digital yang telah mendunia, organisasi pemerintah perlu mengembangkan diri agar dapat mengedepankan pelayanan cepat dan prima untuk *stakeholder*. Pelayanan satu pintu yang kini telah banyak diadaptasi oleh organisasi pemerintah lain perlu dijadikan acuan untuk pengembangan sistem yang dapat diaplikasikan pada ANRI dalam menyongsong IKN Baru. Jika konsep pelayanan tersebut dapat diterapkan, diharapkan akan mempermudah *stakeholder* dan pengguna lainnya mengakses layanan yang disediakan ANRI, konsep layanan terpadu satu pintu yang diaplikasikan melalui web misalnya, dapat memudahkan pengguna untuk memanfaatkan pelayanan tanpa dibatasi ruang dan waktu, ini pun dapat berimbas pada peningkatan kredibilitas organisasi.

Sumber daya manusia yang kompeten dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam menyongsong era teknologi digital perlu diperhatikan dengan seksama. Pemetaan sumber daya manusia sesuai dengan umur, pendidikan terakhir dan keahlian perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi pekerjaan. Berkaitan dengan hal



**Hubungan relativitas pada Revolusi Industri 4.0, <https://www.capgemini.com>.
Diakses pada 25 Juli 2020**

tersebut peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia untuk menunjang kinerja organisasi perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh, pemetaan lebih lanjut pegawai yang perlu mendapatkan pembelajaran dievaluasi untuk dapat ditindaklanjuti demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini entitas dalam organisasi turut menghidupkan atmosfer yang sama sehingga tujuan menjadi tercapai.

Selain hal-hal di atas, juga disempurnakan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas serta berorientasi pada konten informasi dan optimalisasi produk digital (*Digital Data/Information Oriented*). Sistem aplikasi yang stabil dengan pembaharuan hanya pada pembaharuan fitur tidak merusak fundamental atau struktur basis. Secara komprehensif juga perlu diimbangi dengan kemudahan sistem *back up* sehingga bilamana terjadi bencana akan selalu dapat tetap melindungi isi informasi di dalamnya. Infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna juga menjadi elemen tambahan dalam penyempurnaan sistem kearsipan yang modern. Tujuan hilirnya adalah penciptaan pelayanan

yang mampu dikombinasikan antara lembaga dan masyarakat, dengan menitikberatkan kecepatan informasi serta penyediaan data, diseminasi yang lebih luas dan optimal.

Kondisi yang demikian kita dapat berkaca pada beberapa negara seperti Australia, Kanada, New Zealand maupun negara lainnya yang telah menerapkan pola dan konsep digital yang lebih mapan.

Keseluruhan aspek tersebut mulai dari konsep, penyediaan sarana dan prasarana hingga pada kepemimpinan digital tersebut menjadi satu-kesatuan utuh dalam mewujudkan kearsipan yang modern hingga mewujudkan *digital society* di Indonesia.

Dengan demikian bila mana kita mengacu pada pola kesinambungan (konteks arsip) antara IKN lama dengan IKN baru adalah IKN lama tetap menjaga posisi seperti yang terdapat pada sekarang dengan melestarikan fisik diimbangi dengan percepatan digitalisasi arsipnya sehingga mampu menopang keberlangsungan dari sistem di IKN baru. Ditambah dengan adanya pos atau pusat kajian bencana terhadap arsip yang ada di IKN lama dan IKN baru sehingga permasalahan

pada konservasi akan mampu diselaraskan dengan tantangan. Tidak luput yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana penerapan manajemen risiko yang berbasis pada standar internasional (ISO). Diharapkan adanya paradig shift dan perubahan konservasi yang lebih masif mampu mendorong daerah lainnya di Indonesia kegiatan konservasi lebih modern, tepat guna, efektif dan efisien serta mampu diaplikasikan. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat Indonesia yang memandang penting arsip dan memanfaatkan arsip dengan lebih maksimal. Selain itu sinergi antara pemerintah (baik pusat maupun daerah), akademisi, masyarakat dan bila dimungkinkan dunia usaha untuk bersama-sama membumikan arsip dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Hal ini terutama dukungan modernisasi dan percepatan penyajian informasi arsip yang kelak akan membantu masyarakat dalam pemanfaatan dan pendayagunaan arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.